



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Peraturan Bupati tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang, perlu penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Bengkayang.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Pimpinan dan anggota DPRD adalah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bengkayang.
7. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
9. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
10. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
12. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
14. Non ASN yaitu pegawai tidak tetap/tenaga honorer, dan masyarakat yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang berkaitan dengan kepentingan kedinasan.

15. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat perintah melaksanakan tugas bagi Pejabat negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan non ASN.
17. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN.
18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
19. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang menandatangani SPT, SPD maupun Rincian Perhitungan Rampung.
20. Pelaksana SPD adalah Pejabat negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN.
21. Uang representasi adalah uang tambahan yang diberikan dalam pelaksanaan perjalanan dinas kepada pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, dan pejabat eselon II.
22. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus, tanpa disertai bukti kwintansi pengeluaran.
23. Biaya Riil atau *at cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
24. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
25. Tempat kedudukan adalah kota kabupaten/tempat/kantor/instansi asal pelaksana SPD dalam melaksanakan perjalanan dinas.
26. Tempat tujuan adalah kota/tempat/kantor/instansi yang menjadi tujuan bagi pelaksana SPD dalam melaksanakan perjalanan dinas.
27. Pergi pulang yang selanjutnya disingkat PP adalah perjalanan yang dilakukan mulai dari tempat kedudukan menuju tempat tujuan dan kembali ketempat kedudukan.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Perjalanan dinas terdiri dari:
 - a. perjalanan dinas dalam kota;
 - b. perjalanan dinas luar kota dalam wilayah Kabupaten; dan
 - c. perjalanan dinas luar kota di luar wilayah Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam wilayah kecamatan tempat bertugas, dan dari ibu kota kabupaten menuju kecamatan Bengkayang dan sebaliknya.
- (2) Perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam;
 - b. perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam; dan
 - c. perjalanan dinas dalam kota menuju desa wilayah sulit dan sangat sulit.
- (3) Perjalanan dinas luar kota dalam wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan dari ibu kota Kabupaten ke kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten dan sebaliknya dan perjalanan dinas antar kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten.
- (4) Perjalanan dinas luar kota di luar wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke :
 - a. ibu kota provinsi dan/atau kabupaten/kota lainnya di wilayah provinsi Kalimantan Barat dan sebaliknya; dan
 - b. ibu kota negara dan/atau provinsi lainnya dalam wilayah negara Republik Indonesia dan sebaliknya.

Pasal 4

Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
- c. Pengumandahan (Detasering), yaitu penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu;
- d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- h. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pelaksana SPD yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
- j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pelaksana SPD yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan ke tempat pemakaman;
- k. memfasilitasi pelaksanaan tugas negara/pemerintahan yang dilaksanakan oleh pejabat negara, Pimpinan dan anggota DPRD, pejabat eselon I, pejabat eselon II dan pejabat eselon III selaku kepala SKPD yang dilaksanakan di dalam kota, di luar kota dalam wilayah Kabupaten atau di luar kota di luar wilayah Kabupaten;
- l. mengantar/menjemput pejabat negara, Pimpinan dan anggota DPRD, pejabat eselon I, pejabat eselon II dan pejabat Eselon III selaku kepala SKPD dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

BAB III
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 5

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan prinsip:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB IV
LAMANYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Lamanya waktu perjalanan dinas dihitung sejak hari keberangkatan sampai dengan hari kepulangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari;
 - b. perjalanan dinas luar kota dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari, kecuali kecamatan Siding, kecamatan Suti Semarang, kecamatan Lembah Bawang dan desa Pulau Lemukutan kecamatan Sungai Raya Kepulauan, dapat dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari;
 - c. perjalanan dinas luar kota di luar wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari; dan
 - d. perjalanan dinas luar kota di luar wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari.
- (2) Lamanya waktu perjalanan dinas sebagaimana pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dapat dikecualikan untuk perjalanan dinas dengan tempat tujuan lebih dari satu di kota yang berbeda.
- (3) Perjalanan dinas luar kota di luar wilayah Kabupaten dalam rangka konsultasi dan koordinasi yang dilaksanakan di wilayah provinsi Kalimantan Barat maksimal 2 (dua) hari, dan ke ibu kota negara dan/atau provinsi lainnya dalam wilayah negara Republik Indonesia dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari.
- (4) ASN dan non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), yaitu kegiatan sosialisasi, kursus, pendidikan dan pelatihan, penelitian, survei, pengawasan oleh aparat pengawas internal pemerintah, kegiatan pameran, kegiatan kedinasan yang dibuktikan dengan surat resmi dari lembaga yang mengundang, fasilitasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD, persiapan pelaksanaan kegiatan tertentu, Tim Publikasi, Pendampingan Tenaga Teknis, kegiatan pelayanan publik, kunjungan kerja pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD,

kepentingan prioritas pemerintah daerah lainnya dan penugasan khusus oleh Bupati/Wakil Bupati.

- (6) Perjalanan dinas dilarang dilaksanakan pada 2 (dua) hari libur atau lebih secara berturut-turut, kecuali ada undangan resmi dari penyelenggara, kegiatan penanggulangan bencana, kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan, pengamanan demonstrasi, pemeriksaan akhir dalam rangka penerimaan hasil pekerjaan oleh pejabat pembuat komitmen/pejabat pelaksana teknis kegiatan/asisten teknis, survei, pengawasan oleh aparat pengawas internal pemerintah, waktu tunggu persidangan, kegiatan keagamaan dan kegiatan adat budaya, kegiatan pelayanan publik, kepentingan prioritas pemerintah daerah lainnya, kunjungan kerja pejabat negara, dan penugasan khusus oleh Bupati/Wakil Bupati.
- (7) Perjalanan dinas Pimpinan dan/atau anggota DPRD dalam rangka Kunjungan Kerja dan/atau Kaji Terap sehubungan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan diluar Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan maksimal 5 (lima) hari, dan dalam Provinsi Kalimantan Barat maksimal 4 (empat) hari.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan;
 - f. biaya pemetaan dan pemulangan jenazah;
 - g. biaya pemeriksaan kesehatan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transportasi lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Uang harian untuk perjalanan dinas luar kota di luar wilayah Kabupaten dari tempat kedudukan ke Kabupaten/kota lainnya di wilayah provinsi Kalimantan Barat menggunakan satuan uang harian di Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Lampiran II-B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya perjalanan dinas PP dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan atau sebaliknya yang diberikan secara *at cost*, terdiri dari:
 - a. biaya transportasi darat;
 - b. biaya transportasi udara; dan
 - c. biaya transportasi laut.
- (5) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, untuk perjalanan dinas luar kota yang menggunakan pesawat udara, merupakan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
 - a. biaya di tempat kedudukan adalah biaya dari Kabupaten ke Pontianak atau bandara Supadio dan sebaliknya, meliputi biaya taksi atau bukti pembelian BBM; dan

- b. biaya di tempat tujuan adalah biaya dari bandara kedatangan menuju tempat penginapan, tempat acara dan sebaliknya, meliputi biaya taksi, tiket bus, tiket kereta api dan biaya transportasi lainnya khusus untuk perjalanan dinas luar kota di luar wilayah Kabupaten yang ditempuh menggunakan transportasi udara.
- (6) Perjalanan dinas dalam kota menuju desa wilayah sulit dan sangat sulit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c berlaku untuk pelaksana SPD pegawai kecamatan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II-D dengan besaran maksimal sebesar 50% dari ketentuan sebagaimana dalam Lampiran II-D yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Bupati ini.
- (7) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, untuk perjalanan dinas luar kota dalam wilayah Kabupaten ke Desa terpencil/sulit merupakan biaya perjalanan dinas yang diberikan dengan mempertimbangkan kesulitan akses dan estimasi biaya setempat termasuk biaya ojek, sewa kendaraan, dan biaya kerusakan apabila menggunakan kendaraan pribadi, sebagaimana dalam Lampiran II-D yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Bupati ini.
- (8) Dalam hal biaya transportasi darat perjalanan bagi pejabat negara, pimpinan DPRD serta pejabat setingkat eselon II yang menggunakan kendaraan dinas melebihi satuan biaya yang telah ditetapkan, maka biaya transportasi darat dimaksud dapat dibayarkan sesuai dengan bukti pembayaran yang sah berupa struk/nota/kuitansi/bon pembelian BBM
- (9) Biaya transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi tiket pesawat termasuk biaya bagasi, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. kelas bisnis, hanya digunakan oleh pejabat negara dan pimpinan DPRD; dan
- b. kelas ekonomi, dapat digunakan oleh seluruh pelaksana SPD.
- Dalam hal kota tujuan belum diatur dan pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri melebihi besaran standar biaya tiket pesawat dalam Lampiran II-G, perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*) dan sesuai dengan kelas penerbangan yang diperkenankan.
- (10) Biaya bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), berlaku dalam hal maskapai tidak memberikan layanan bagasi gratis dan terjadi kelebihan bagasi akibat membawa barang-barang tertentu yang digunakan untuk keperluan pemerintahan daerah, seperti komputer server, dokumen lainnya.
- (11) Biaya transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dapat digunakan dalam hal *force majeure* dan dibatasi hanya untuk perjalanan dinas dari ibu kota negara dan/atau provinsi lainnya dalam wilayah negara Republik Indonesia menuju tempat kedudukan dan diberikan secara *at cost* sesuai dengan bukti pembayaran yang sah, ditambah dengan uang makan sebesar Rp.75.000,00 per hari dan uang representasi selama menggunakan transportasi laut berkenaan.
- (12) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya, diberikan secara *at cost* sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, serta ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).

- (13) Biaya penginapan untuk keperluan perjalanan dinas, diatur sebagai berikut :
- a. luar kota dalam wilayah Kabupaten menggunakan tarif hotel dalam wilayah Kabupaten, sebagaimana dalam Lampiran II-A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dikecualikan jika menginap di wilayah kecamatan Sungai Raya Kepulauan dapat menggunakan tarif hotel di Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Lampiran II-H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Dalam hal tidak menggunakan penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel dalam Lampiran II-A; dan
 - b. luar kota di luar wilayah Kabupaten dengan tempat tujuan Kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat menggunakan tarif hotel di Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Lampiran II-H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (15) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan secara *lumpsum* kepada pejabat negara, pimpinan DPRD, anggota DPRD dan pejabat eselon II selama melakukan perjalanan dinas.
- (16) Sewa kendaraan dalam kota di tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan kepada pejabat negara untuk keperluan pelaksanaan tugas selama perjalanan dinas di kota tempat tujuan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. perjalanan dinas ke kabupaten/kota lainnya di wilayah provinsi Kalimantan Barat yang ditempuh menggunakan transportasi udara;
 - b. perjalanan dinas ke provinsi lainnya dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditempuh menggunakan transportasi udara; dan
 - c. perjalanan dinas ke ibu kota negara.
- (17) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (18) Untuk perjalanan dinas luar kota di luar wilayah Kabupaten dengan tujuan provinsi-provinsi di pulau Kalimantan dan menuju ke kabupaten/kota sekitar di provinsi berkenaan yang ditempuh menggunakan transportasi darat, biaya transport diatur sebagai berikut:
- a. diberikan biaya transportasi darat sesuai dengan satuan biaya pada Lampiran II-E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. diberikan biaya sewa kendaraan menggunakan indeks satuan biaya sewa untuk Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana diatur dalam Lampiran II-J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. biaya sewa kendaraan sebagaimana pada huruf b tidak diberikan dalam hal perjalanan dinas dilakukan menggunakan kendaraan dinas;
 - d. perjalanan dinas dengan tujuan sama yang dilakukan secara rombongan menggunakan sewa kendaraan roda 4 (empat) berjumlah Minimal 3 (tiga) orang per kendaraan;
 - e. perjalanan dinas menggunakan sewa bus, jumlah pelaksana SPD menyesuaikan kapasitas penumpang bus berkenaan dan berlaku ketentuan pada ayat (17); dan

- f. pelaksana SPD yang menggunakan sewa kendaraan, tidak diberikan biaya transportasi darat;
- (19) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pejabat berwenang dapat membayarkan tambahan uang harian, biaya transportasi darat di tempat tujuan, biaya penginapan, dan uang representasi, sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian dari pelaksana SPD bersangkutan, dan dibuktikan dengan keterangan tertulis dari penyelenggara dan/atau pihak lain yang berwenang.
 - (20) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka pelaksana SPD wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya yang diterima ke Kas Bendahara Pengeluaran atau Kas Daerah.
 - (21) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, hanya diberikan uang transport lokal secara *lumpsum* sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (2) Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, diberikan uang harian secara *lumpsum*.
- (3) Perjalanan dinas luar kota di dalam wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diberikan biaya perjalanan dinas dengan komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan; dan/atau
 - d. uang representasi.
- (4) Perjalanan dinas luar kota di luar wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, diberikan biaya perjalanan dinas dengan komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi; dan/atau
 - e. sewa kendaraan.

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayar dimuka (panjar) sebelum perjalanan dinas dilakukan dan diperhitungkan kembali sesuai dengan tingkat biaya perjalanan dinas yang digunakan, setelah pelaksana SPD selesai melaksanakan tugas, sesuai format sebagaimana tercantum Lampiran I-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilakukan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (3) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran bertanggung jawab dalam mengendalikan pelaksanaan perjalanan dinas di masing-masing SKPD

dengan memperhatikan aspek kepatutan, urgensi, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

BAB VI

SURAT TUGAS DAN SURAT PERJALANAN DINAS

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas oleh pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan pelaksana SPD yang tertuang dalam ST.
- (2) Ketentuan mengenai pejabat yang berwenang menerbitkan ST diatur sebagai berikut:
 - a. Bupati menerbitkan ST untuk perjalanan dinas luar kota di luar wilayah Kabupaten bagi pejabat negara, ASN dan Non ASN. Dalam hal Bupati berhalangan maka ST diterbitkan oleh Wakil Bupati dan dalam hal Wakil Bupati berhalangan maka ST diterbitkan oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Bupati menerbitkan ST untuk perjalanan dinas dalam kota bagi Sekretaris Daerah, dalam hal Bupati berhalangan maka ST diterbitkan oleh Wakil Bupati;
 - c. Ketua DPRD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam hal ketua DPRD berhalangan maka ST untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD diterbitkan oleh Wakil Ketua DPRD;
 - d. Sekretaris Daerah menerbitkan ST perjalanan dinas dalam kota dan luar kota dalam wilayah Kabupaten, bagi ASN dan Non ASN. Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan maka ST diterbitkan oleh Asisten III;
 - e. ST sebagaimana pada huruf a dan huruf d yang diterbitkan harus disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten yang membidangi;
 - f. Camat menerbitkan ST untuk perjalanan dinas dalam kota dan luar kota dalam wilayah Kabupaten bagi Camat, Lurah, ASN dan Non ASN di SKPD dan unit SKPD kecamatan selain ketentuan dalam huruf a dan huruf b, dalam hal Camat berhalangan maka ST untuk Lurah, ASN dan Non ASN dapat diterbitkan oleh Sekretaris Kecamatan;
 - g. Kepala UPTD menerbitkan ST untuk perjalanan dinas bagi kepala UPTD, ASN dan Non ASN di lingkungan UPTD selain ketentuan dalam huruf a dan huruf b.
- (3) ST diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan menjadi dasar bagi PPK dalam menerbitkan SPD dan Lampiran SPD bagi pelaksana SPD.
- (4) Untuk penugasan yang sama diterbitkan satu SPD dan satu Lampiran SPD untuk satu orang atau lebih, sesuai ketentuan dalam Pasal (6) yang mengatur jumlah pelaksana SPD.
- (5) Lampiran SPD wajib ditandatangani oleh pejabat berwenang di satu tempat tujuan atau lebih, sesuai dengan penugasan dalam ST/SPD berkenaan.
- (6) Format ST dan SPD serta lampiran SPD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 11

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas kepada pemberi tugas dengan melaporkan kegiatan perjalanan dinas secara tertulis, sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran I-F yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas kepada PPK dilakukan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. ST yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK;
 - c. Lampiran SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat berwenang di tempat tujuan;
 - d. Tiket pesawat, *boarding pass*, retribusi, bukti pembayaran bagasi dan bukti pembayaran yang sah untuk biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a;
 - e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan atau usaha jasa penyewaan perorangan;
 - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - g. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - h. Rincian Biaya Perjalanan Dinas yang memuat komponen biaya perjalanan dinas dan Perhitungan SPD Rampung sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g.
- (5) Pejabat berwenang menandatangani Lampiran SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yaitu pimpinan atau pejabat pada instansi pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, instansi/lembaga swasta atau ketua panitia pelaksana kegiatan di tempat tujuan.
- (6) ST, SPD dan Lampiran SPD dicetak menggunakan jenis kertas *Houtvrij Schrijfpapier* (HVS) ukuran A4 dengan gramatur paling sedikit 70 (tujuh puluh) gram/m², dan menggunakan jenis huruf Arial ukuran 11 atau 12 dengan jarak spasi disesuaikan dengan memperhatikan aspek keserasian dan estetika.

BAB VIII
PERJALANAN DINAS NON ASN

Pasal 12

- (1) Non ASN dapat melakukan perjalanan dinas dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan kinerja SKPD berkenaan.
- (2) Perjalanan dinas non ASN hanya dapat diberikan untuk perjalanan dinas dalam kota dan perjalanan dinas luar kota dalam wilayah Kabupaten.
- (3) Perjalanan dinas luar kota di luar wilayah Kabupaten bagi non ASN dapat diberikan dalam hal sangat diperlukan untuk kepentingan SKPD dan kepentingan daerah.
- (4) Perjalanan dinas luar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan sangat selektif dengan memperhatikan aspek kepatutan, urgensi, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

ASN dan Non ASN dengan penugasan sebagai ajudan, Pengawalan Melekat dan/atau sopir yang melakukan perjalanan dinas bersama-sama dengan pejabat Negara/Istri, pimpinan DPRD dan/atau pejabat setingkat eselon II dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan :

- a. perjalanan dinas luar kota dalam wilayah Kabupaten dan perjalanan dinas luar kota di luar wilayah Kabupaten ke ibu kota provinsi dan/atau kabupaten/kota lainnya di wilayah provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan perjalanan dinas luar kota di luar wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, diberikan uang harian dan biaya penginapan; dan
- b. perjalanan dinas luar kota di luar wilayah Kabupaten ke ibu kota negara dan/atau provinsi lainnya dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, diberikan komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditambah dengan biaya transportasi darat di tempat tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b dan biaya transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) huruf b.
- c. Perjalanan dinas jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD yang mengikutsertakan Ajudan dan Pengawal dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- d. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih tinggi dari satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana yang ditetapkan, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan perjalanan dinas untuk kegiatan tertentu, pejabat negara dapat didampingi oleh istri/suami, sepanjang dipandang perlu

pendamping atau ada ketentuan yang mewajibkan perjalanan dinas dimaksud harus didampingi oleh istri/suami.

- (2) Perjalanan dinas istri/suami pejabat negara dalam rangka mendampingi pejabat negara, cukup dengan mencantumkan nama yang bersangkutan di dalam kolom Pengikut pada SPD berkenaan tanpa diterbitkan ST.
- (3) Istri/Suami pejabat negara dalam rangka mendampingi pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan uang harian dan biaya tiket pesawat sesuai kelas yang digunakan pejabat negara.
- (4) Biaya perjalanan dinas untuk istri/suami pejabat negara dalam rangka melaksanakan tugas-tugas organisasi dan kegiatan lainnya diberikan setara dengan pejabat eselon III.

Pasal 15

- (1) Uang Harian Diklat merupakan pengganti uang harian yang diberikan secara *lumpsum* kepada pelaksana SPD dalam rangka mengikuti kegiatan Diklat, sebagaimana pada kolom (5) dalam Lampiran II-B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pendidikan dan pelatihan singkat, bimbingan teknis, seminar, *workshop*, dan kegiatan sejenis lainnya yang memerlukan biaya kontribusi peserta atau jika akomodasi ditanggung oleh pihak penyelenggara, untuk konsumsi minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari.
- (3) Dikecualikan kategori diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah diklat prajabatan (*latsar*), diklat kepemimpinan, diklat fungsional dan kegiatan sejenis lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan telah dianggarkan seluruh pembiayaannya dalam DPA SKPD atau DPPA SKPD penyelenggara diklat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang;
- b. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang;
- c. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang;
- d. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati Bengkayang ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2023

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bengkayang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 12 Juni 2023

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 12 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

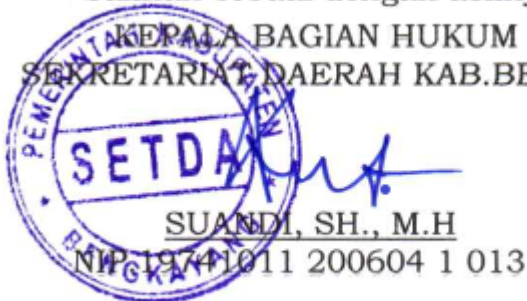
TTD

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP.19741011 200604 1 013

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 12 TAHUN 2023
TANGGAL : 12 Juli 2023
TENTANG
PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

FORMAT SURAT TUGAS, SURAT PERJALANAN DINAS, LAMPIRAN SPD,
RINCIAN BIAYA, DAFTAR PENGELUARAN RILL, LAPORAN PERJALANAN
DINAS, DAN SURAT PERNYATAAN

A. BENTUK SURAT TUGAS

| | |
|-------------------------|--|
| <h1>KOP</h1> | |
| SURAT TUGAS | |
| NOMOR | |
| Dasar | : |
| MEMERINTAHKAN : | |
| Kepada | : 1. Nama : Pangkat/Gol : NIP : Jabatan : |
| | 2. Nama : Pangkat/Gol : NIP : Jabatan : |
| Untuk | : 1. 2. 3. |
| Nama Tempat, Tanggal | |
| Pejabat yang berwenang, | |
| (.....) NIP..... | |

B. BENTUK SURAT PERJALANAN DINAS

KOP

Lembar ke :
 Kode No. :
 Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

| | | | |
|-----|---|----------------|------------|
| 1. | Pejabat Pembuat Komitmen | | |
| 2. | Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas | | |
| 3. | a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | a. b. c. | |
| 4. | Maksud Perjalanan Dinas | | |
| 5. | Alat angkutan yang dipergunakan | | |
| 6. | a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan | a. b. | |
| 7. | a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali | a. b. c. | |
| 8. | Pengikut : Nama | Tanggal Lahir | Keterangan |
| | 1. 2. 3. | | |
| 9. | Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun | a. b. | |
| 10. | Keterangan lain-lain | | |

Dikeluarkan di
Bengkayang
tanggal.....

Pejabat Pembuat Komitmen,

(.....)
NIP.....

C. BENTUK LAMPIRAN SPD

| | |
|--|---|
| I. Nomor SPD : Berangkat dari : (tempat kedudukan) Ke : Pada tanggal : PA/KPA/PPKom (.....) NIP. | |
| II. Tiba di : Pada tanggal : (.....) NIP. | Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : (.....) NIP. |
| III. Tiba di : Pada tanggal : (.....) NIP. | Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : (.....) NIP. |
| IV. Tiba di : Pada tanggal : PA/KPA/PPKom (.....) NIP. | Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. |
| V. CATATAN LAIN-LAIN | |
| VI. PERHATIAN Pejabat Pembuat Komitmen yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya. | |

Dikeluarkan di Bengkulu *
 tanggal.....

Pejabat Pembuat Komitmen,

(.....)
 NIP.....

*. Digunakan apabila biaya perjalanan dinas di tanggung oleh dinas instansi penyelenggara kegiatan.

D. RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
 Tanggal :

| No | Perincian Biaya | Jumlah | Keterangan |
|---------------|------------------------|---------------|-------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Jumlah | | Rp. | |
| Terbilang : | | | |

| | |
|---|--|
| Telah dibayar sejumlah Rp Bendahara Pengeluaran, (.....) NIP. | Bengkulu, Telah menerima jumlah uang sebesar Rp Yang Menerima, (.....) NIP. |
|---|--|

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

| | |
|---------------------------|-----------|
| Ditetapkan sejumlah | : Rp..... |
| Yang telah dibayar semula | : Rp..... |
| Sisa kurang/lebih | : Rp..... |

Pejabat Pembuat Komitmen,

 (.....)
 NIP.

E. DAFTAR PENGELUARAN RIIL

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor Tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti – bukti pengeluarannya meliputi :

| No | Uraian | Jumlah |
|-------------|---------------|--------|
| | | |
| | Jumlah | |
| Terbilang : | | |

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
 Pejabat Pembuat Komitmen,

Bengkayang,
 Pelaksana SPD,

(.....)
 NIP.

(.....)
 NIP.

F. FORMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS

KOP INSTANSI

LAPORAN
TENTANG

.....

- A. Pendahuluan
 - 1. Umum/latar belakang
 - 2. Landasan Hukum
 - 3. Maksud dan Tujuan
- B. Kegiatan yang dilaksanakan
- C. Hasil yang dicapai
- D. Kesimpulan dan Saran
- E. Penutup

Dibuat di
Pada tanggal

Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP.

G. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS, DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH PEJABAT YANG MENERBITKAN SURAT TUGAS

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

NOMOR :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya , bahwa tugas Perjalanan Dinas atas nama :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Nomor dan Tanggal ST :
Nomor dan Tanggal SPD :

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu :

.....
.....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat /pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkayang,
Yang Membuat Pernyataan

.....

H. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS, DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

**SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS**

NOMOR :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya , bahwa tugas Perjalanan Dinas atas nama :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Nomor dan Tanggal ST :
Nomor dan Tanggal SPD :

Dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Nomor
Tanggal

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa Dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan/panjar atas beban DPA/DPPA tidak dapat dikembalikan (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp....., sehingga dibebankan pada DPA/DPPA Nomor : Tanggal SKPD

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetor kerugian negara tersebut ke Kas Daerah.

Bengkayang,

Yang Membuat Pernyataan

.....

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 12 TAHUN 2023
 TANGGAL : 12 Juli 2023
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

A. SATUAN UANG HARIAN DAN BIAYA PENGINAPAN DALAM WILAYAH KABUPATEN

| No | Komponen | Satuan | Satuan Biaya | | | |
|-----|---|--------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| | | | Pejabat Negara/ Pimpinan DPRD | Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II | Pejabat Eselon III/ Golongan IV | Pejabat Eselon IV/ Golongan III/II/I/ Non ASN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | <i>Dalam kota Lebih dari 8 (Jam):</i> | | | | | |
| | Uang Harian | OH | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | <i>Luar Kota Dalam Wilayah Kabupaten:</i> | | | | | |
| 1. | Uang Harian | OH | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 2. | Tarif Hotel | OH | 400.000 | 350.000 | 300.000 | 250.000 |

B. SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DI LUAR WILAYAH KABUPATEN DAN UANG HARIAN DIKLAT

| No | Provinsi | Satuan | Uang Harian Luar Kota Luar Wilayah Kabupaten | Uang Harian Diklat |
|-----|---------------------|--------|--|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Aceh | OH | 360.000 | 110.000 |
| 2. | Sumatera Utara | OH | 370.000 | 110.000 |
| 3. | Riau | OH | 370.000 | 110.000 |
| 4. | Kepulauan Riau | OH | 370.000 | 110.000 |
| 5. | Jambi | OH | 370.000 | 110.000 |
| 6. | Sumatera Barat | OH | 380.000 | 110.000 |
| 7. | Sumatera Selatan | OH | 380.000 | 110.000 |
| 8. | Lampung | OH | 380.000 | 110.000 |
| 9. | Bengkulu | OH | 380.000 | 110.000 |
| 10. | Bangka Belitung | OH | 410.000 | 120.000 |
| 11. | Banten | OH | 370.000 | 110.000 |
| 12. | Jawa Barat | OH | 430.000 | 130.000 |
| 13. | D.K.I. Jakarta | OH | 530.000 | 160.000 |
| 14. | Jawa Tengah | OH | 370.000 | 110.000 |
| 15. | D.I. Yogyakarta | OH | 420.000 | 130.000 |
| 16. | Jawa Timur | OH | 410.000 | 120.000 |
| 17. | Bali | OH | 480.000 | 140.000 |
| 18. | Nusa Tenggara Barat | OH | 440.000 | 130.000 |
| 19. | Nusa Tenggara Timur | OH | 430.000 | 130.000 |
| 20. | Kalimantan Barat | OH | 380.000 | 110.000 |
| 21. | Kalimantan Tengah | OH | 360.000 | 110.000 |
| 22. | kalimantan Selatan | OH | 380.000 | 110.000 |

| No | Provinsi | Satuan | Uang Harian Luar Kota Luar Wilayah Kabupaten | Uang Harian Diklat |
|-----|-------------------|--------|--|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 23. | Kalimantan Timur | OH | 430.000 | 130.000 |
| 24. | Kalimantan Utara | OH | 430.000 | 130.000 |
| 25. | Sulawesi Utara | OH | 370.000 | 110.000 |
| 26. | Gorontalo | OH | 370.000 | 110.000 |
| 27. | Sulawesi Barat | OH | 410.000 | 120.000 |
| 28. | Sulawesi Selatan | OH | 430.000 | 130.000 |
| 29. | Sulawesi Tengah | OH | 370.000 | 110.000 |
| 30. | Sulawesi Tenggara | OH | 380.000 | 110.000 |
| 31. | Maluku | OH | 380.000 | 110.000 |
| 32. | Maluku Utara | OH | 430.000 | 130.000 |
| 33. | Papua | OH | 580.000 | 170.000 |
| 34. | Papua Barat | OH | 480.000 | 140.000 |

**C. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS LUAR KOTA
DALAM WILAYAH KABUPATEN**

| No | Tempat Kedudukan | Tempat Tujuan | Satuan | Mobil | Sepeda Motor |
|-----|------------------|-----------------------|--------|---------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Bengkayang | Sungai Raya | PP | 400.000 | 100.000 |
| 2. | Bengkayang | Sungai Raya Kepulauan | PP | 330.000 | 80.000 |
| 3. | Bengkayang | Capkala | PP | 220.000 | 60.000 |
| 4. | Bengkayang | Monterado | PP | 170.000 | 50.000 |
| 5. | Bengkayang | Samalantan | PP | 140.000 | 50.000 |
| 6. | Bengkayang | Lembah Bawang | PP | 200.000 | 50.000 |
| 7. | Bengkayang | Sungai Betung | PP | 100.000 | 50.000 |
| 8. | Bengkayang | Teriak | PP | 100.000 | 50.000 |
| 9. | Bengkayang | Suti Semarang | PP | 200.000 | 100.000 |
| 10. | Bengkayang | Lumar | PP | 100.000 | 50.000 |
| 11. | Bengkayang | Ledo | PP | 130.000 | 50.000 |
| 12. | Bengkayang | Sanggau Ledo | PP | 190.000 | 50.000 |
| 13. | Bengkayang | Tujuh Belas | PP | 210.000 | 60.000 |
| 14. | Bengkayang | Seluas | PP | 260.000 | 70.000 |
| 15. | Bengkayang | Jagoi Babang | PP | 310.000 | 80.000 |
| 16. | Bengkayang | Siding | PP | 360.000 | 90.000 |
| 17. | Sungai Raya | Capkala | PP | 100.000 | 50.000 |
| 18. | Sungai Raya | Monterado | PP | 130.000 | 50.000 |
| 19. | Sungai Raya | Samalantan | PP | 260.000 | 70.000 |
| 20. | Sungai Raya | Lembah Bawang | PP | 350.000 | 90.000 |
| 21. | Sungai Raya | Sungai Betung | PP | 340.000 | 90.000 |
| 22. | Sungai Raya | Teriak | PP | 430.000 | 110.000 |
| 23. | Sungai Raya | Suti Semarang | PP | 560.000 | 140.000 |
| 24. | Sungai Raya | Lumar | PP | 450.000 | 110.000 |
| 25. | Sungai Raya | Ledo | PP | 520.000 | 130.000 |
| 26. | Sungai Raya | Sanggau Ledo | PP | 580.000 | 140.000 |
| 27. | Sungai Raya | Tujuh Belas | PP | 610.000 | 150.000 |
| 28. | Sungai Raya | Seluas | PP | 650.000 | 160.000 |
| 29. | Sungai Raya | Jagoi Babang | PP | 700.000 | 170.000 |
| 30. | Sungai Raya | Siding | PP | 750.000 | 180.000 |
| 31. | Sungai Raya | Bengkayang | PP | 400.000 | 100.000 |

| No | Tempat Kedudukan | Tempat Tujuan | Satuan | Mobil | Sepeda Motor |
|-----|-----------------------|-----------------------|--------|---------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 32. | Sungai Raya | Sungai Raya Kepulauan | PP | 100.000 | 50.000 |
| 33. | Sungai Raya Kepulauan | Sungai Raya | PP | 100.000 | 50.000 |
| 34. | Sungai Raya Kepulauan | Capkala | PP | 100.000 | 50.000 |
| 35. | Sungai Raya Kepulauan | Monterado | PP | 150.000 | 50.000 |
| 36. | Sungai Raya Kepulauan | Samalantan | PP | 200.000 | 50.000 |
| 37. | Sungai Raya Kepulauan | Lembah Bawang | PP | 290.000 | 70.000 |
| 38. | Sungai Raya Kepulauan | Sungai Betung | PP | 280.000 | 70.000 |
| 39. | Sungai Raya Kepulauan | Teriak | PP | 370.000 | 90.000 |
| 40. | Sungai Raya Kepulauan | Suti Semarang | PP | 500.000 | 120.000 |
| 41. | Sungai Raya Kepulauan | Lumar | PP | 390.000 | 100.000 |
| 42. | Sungai Raya Kepulauan | Ledo | PP | 460.000 | 110.000 |
| 43. | Sungai Raya Kepulauan | Sanggau Ledo | PP | 520.000 | 130.000 |
| 44. | Sungai Raya Kepulauan | Tujuh Belas | PP | 540.000 | 130.000 |
| 45. | Sungai Raya Kepulauan | Seluas | PP | 590.000 | 150.000 |
| 46. | Sungai Raya Kepulauan | Jagoi Babang | PP | 640.000 | 160.000 |
| 47. | Sungai Raya Kepulauan | Siding | PP | 690.000 | 170.000 |
| 48. | Sungai Raya Kepulauan | Bengkayang | PP | 330.000 | 80.000 |
| 49. | Capkala | Bengkayang | PP | 220.000 | 60.000 |
| 50. | Capkala | Sungai Raya | PP | 100.000 | 50.000 |
| 51. | Capkala | Sungai Raya Kepulauan | PP | 100.000 | 50.000 |
| 52. | Capkala | Monterado | PP | 100.000 | 50.000 |
| 53. | Capkala | Samalantan | PP | 100.000 | 50.000 |
| 54. | Capkala | Lembah Bawang | PP | 180.000 | 50.000 |
| 55. | Capkala | Sungai Betung | PP | 170.000 | 50.000 |
| 56. | Capkala | Teriak | PP | 260.000 | 70.000 |
| 57. | Capkala | Suti Semarang | PP | 380.000 | 100.000 |
| 58. | Capkala | Lumar | PP | 280.000 | 70.000 |
| 59. | Capkala | Ledo | PP | 350.000 | 90.000 |
| 60. | Capkala | Sanggau Ledo | PP | 410.000 | 100.000 |
| 61. | Capkala | Tujuh Belas | PP | 430.000 | 110.000 |
| 62. | Capkala | Seluas | PP | 480.000 | 120.000 |
| 63. | Capkala | Jagoi Babang | PP | 530.000 | 130.000 |
| 64. | Capkala | Siding | PP | 580.000 | 140.000 |
| 65. | Monterado | Samalantan | PP | 100.000 | 50.000 |
| 66. | Monterado | Lembah Bawang | PP | 120.000 | 50.000 |
| 67. | Monterado | Sungai Betung | PP | 110.000 | 50.000 |
| 68. | Monterado | Teriak | PP | 200.000 | 50.000 |
| 69. | Monterado | Suti Semarang | PP | 320.000 | 80.000 |
| 70. | Monterado | Lumar | PP | 220.000 | 60.000 |
| 71. | Monterado | Ledo | PP | 290.000 | 70.000 |
| 72. | Monterado | Sanggau Ledo | PP | 350.000 | 90.000 |
| 73. | Monterado | Tujuh Belas | PP | 380.000 | 90.000 |
| 74. | Monterado | Seluas | PP | 430.000 | 110.000 |
| 75. | Monterado | Jagoi Babang | PP | 470.000 | 120.000 |
| 76. | Monterado | Siding | PP | 520.000 | 130.000 |
| 77. | Monterado | Bengkayang | PP | 170.000 | 50.000 |
| 78. | Monterado | Capkala | PP | 100.000 | 50.000 |
| 79. | Monterado | Sungai Raya | PP | 130.000 | 50.000 |
| 80. | Monterado | Sungai Raya Kepulauan | PP | 150.000 | 50.000 |
| 81. | Samalantan | Lembah Bawang | PP | 100.000 | 50.000 |
| 82. | Samalantan | Sungai Betung | PP | 100.000 | 50.000 |

| No | Tempat Kedudukan | Tempat Tujuan | Satuan | Mobil | Sepeda Motor |
|------|------------------|-----------------------|--------|---------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 83. | Samalantan | Teriak | PP | 170.000 | 50.000 |
| 84. | Samalantan | Suti Semarang | PP | 300.000 | 80.000 |
| 85. | Samalantan | Lumar | PP | 190.000 | 50.000 |
| 86. | Samalantan | Ledo | PP | 260.000 | 70.000 |
| 87. | Samalantan | Sanggau Ledo | PP | 320.000 | 80.000 |
| 88. | Samalantan | Tujuh Belas | PP | 350.000 | 90.000 |
| 89. | Samalantan | Seluas | PP | 400.000 | 100.000 |
| 90. | Samalantan | Jagoi Babang | PP | 440.000 | 110.000 |
| 91. | Samalantan | Siding | PP | 490.000 | 120.000 |
| 92. | Samalantan | Bengkayang | PP | 140.000 | 50.000 |
| 93. | Samalantan | Capkala | PP | 100.000 | 50.000 |
| 94. | Samalantan | Sungai Raya | PP | 260.000 | 70.000 |
| 95. | Samalantan | Sungai Raya Kepulauan | PP | 200.000 | 50.000 |
| 96. | Samalantan | Monterado | PP | 100.000 | 50.000 |
| 97. | Lembah Bawang | Sungai Betung | PP | 180.000 | 50.000 |
| 98. | Lembah Bawang | Teriak | PP | 250.000 | 60.000 |
| 99. | Lembah Bawang | Suti Semarang | PP | 400.000 | 100.000 |
| 100. | Lembah Bawang | Lumar | PP | 250.000 | 60.000 |
| 101. | Lembah Bawang | Ledo | PP | 320.000 | 80.000 |
| 102. | Lembah Bawang | Sanggau Ledo | PP | 380.000 | 90.000 |
| 103. | Lembah Bawang | Tujuh Belas | PP | 410.000 | 100.000 |
| 104. | Lembah Bawang | Seluas | PP | 460.000 | 110.000 |
| 105. | Lembah Bawang | Jagoi Babang | PP | 500.000 | 120.000 |
| 106. | Lembah Bawang | Siding | PP | 550.000 | 140.000 |
| 107. | Lembah Bawang | Bengkayang | PP | 200.000 | 50.000 |
| 108. | Lembah Bawang | Capkala | PP | 180.000 | 50.000 |
| 109. | Lembah Bawang | Sungai Raya | PP | 350.000 | 90.000 |
| 110. | Lembah Bawang | Sungai Raya Kepulauan | PP | 290.000 | 70.000 |
| 111. | Lembah Bawang | Monterado | PP | 120.000 | 50.000 |
| 112. | Lembah Bawang | Samalantan | PP | 100.000 | 50.000 |
| 113. | Sungai Betung | Teriak | PP | 100.000 | 50.000 |
| 114. | Sungai Betung | Suti Semarang | PP | 200.000 | 50.000 |
| 115. | Sungai Betung | Lumar | PP | 110.000 | 30.000 |
| 116. | Sungai Betung | Ledo | PP | 180.000 | 50.000 |
| 117. | Sungai Betung | Sanggau Ledo | PP | 240.000 | 60.000 |
| 118. | Sungai Betung | Tujuh Belas | PP | 270.000 | 70.000 |
| 119. | Sungai Betung | Seluas | PP | 320.000 | 80.000 |
| 120. | Sungai Betung | Jagoi Babang | PP | 360.000 | 90.000 |
| 121. | Sungai Betung | Siding | PP | 410.000 | 100.000 |
| 122. | Sungai Betung | Bengkayang | PP | 100.000 | 50.000 |
| 123. | Sungai Betung | Capkala | PP | 170.000 | 50.000 |
| 124. | Sungai Betung | Sungai Raya | PP | 340.000 | 90.000 |
| 125. | Sungai Betung | Sungai Raya Kepulauan | PP | 280.000 | 70.000 |
| 126. | Sungai Betung | Monterado | PP | 110.000 | 50.000 |
| 127. | Sungai Betung | Samalantan | PP | 100.000 | 50.000 |
| 128. | Sungai Betung | Lembah Bawang | PP | 180.000 | 50.000 |
| 129. | Teriak | Suti Semarang | PP | 200.000 | 50.000 |
| 130. | Teriak | Lumar | PP | 100.000 | 50.000 |
| 131. | Teriak | Ledo | PP | 170.000 | 50.000 |
| 132. | Teriak | Sanggau Ledo | PP | 220.000 | 60.000 |
| 133. | Teriak | Tujuh Belas | PP | 260.000 | 70.000 |

| No | Tempat Kedudukan | Tempat Tujuan | Satuan | Mobil | Sepeda Motor |
|------|------------------|-----------------------|--------|---------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 134. | Teriak | Seluas | PP | 310.000 | 80.000 |
| 135. | Teriak | Jagoi Babang | PP | 350.000 | 90.000 |
| 136. | Teriak | Siding | PP | 400.000 | 100.000 |
| 137. | Teriak | Bengkayang | PP | 100.000 | 50.000 |
| 138. | Teriak | Capkala | PP | 260.000 | 70.000 |
| 139. | Teriak | Sungai Raya | PP | 430.000 | 110.000 |
| 140. | Teriak | Sungai Raya Kepulauan | PP | 370.000 | 90.000 |
| 141. | Teriak | Monterado | PP | 200.000 | 50.000 |
| 142. | Teriak | Samalantan | PP | 170.000 | 50.000 |
| 143. | Teriak | Lembah Bawang | PP | 250.000 | 60.000 |
| 144. | Teriak | Sungai Betung | PP | 100.000 | 50.000 |
| 145. | Suti Semarang | Lumar | PP | 200.000 | 50.000 |
| 146. | Suti Semarang | Ledo | PP | 290.000 | 70.000 |
| 147. | Suti Semarang | Sanggau Ledo | PP | 340.000 | 90.000 |
| 148. | Suti Semarang | Tujuh Belas | PP | 370.000 | 90.000 |
| 149. | Suti Semarang | Seluas | PP | 430.000 | 110.000 |
| 150. | Suti Semarang | Jagoi Babang | PP | 470.000 | 120.000 |
| 151. | Suti Semarang | Siding | PP | 500.000 | 120.000 |
| 152. | Suti Semarang | Bengkayang | PP | 200.000 | 100.000 |
| 153. | Suti Semarang | Capkala | PP | 380.000 | 100.000 |
| 154. | Suti Semarang | Sungai Raya | PP | 560.000 | 140.000 |
| 155. | Suti Semarang | Sungai Raya Kepulauan | PP | 500.000 | 120.000 |
| 156. | Suti Semarang | Monterado | PP | 320.000 | 80.000 |
| 157. | Suti Semarang | Samalantan | PP | 300.000 | 80.000 |
| 158. | Suti Semarang | Lembah Bawang | PP | 400.000 | 100.000 |
| 159. | Suti Semarang | Sungai Betung | PP | 200.000 | 50.000 |
| 160. | Suti Semarang | Teriak | PP | 200.000 | 50.000 |
| 161. | Lumar | Ledo | PP | 100.000 | 50.000 |
| 162. | Lumar | Sanggau Ledo | PP | 130.000 | 50.000 |
| 163. | Lumar | Tujuh Belas | PP | 160.000 | 50.000 |
| 164. | Lumar | Seluas | PP | 210.000 | 50.000 |
| 165. | Lumar | Jagoi Babang | PP | 260.000 | 70.000 |
| 166. | Lumar | Siding | PP | 310.000 | 80.000 |
| 167. | Lumar | Bengkayang | PP | 100.000 | 50.000 |
| 168. | Lumar | Capkala | PP | 280.000 | 70.000 |
| 169. | Lumar | Sungai Raya | PP | 450.000 | 110.000 |
| 170. | Lumar | Sungai Raya Kepulauan | PP | 390.000 | 100.000 |
| 171. | Lumar | Monterado | PP | 220.000 | 60.000 |
| 172. | Lumar | Samalantan | PP | 190.000 | 50.000 |
| 173. | Lumar | Lembah Bawang | PP | 250.000 | 60.000 |
| 174. | Lumar | Sungai Betung | PP | 110.000 | 30.000 |
| 175. | Lumar | Teriak | PP | 100.000 | 50.000 |
| 176. | Lumar | Suti Semarang | PP | 200.000 | 50.000 |
| 177. | Ledo | Sanggau Ledo | PP | 100.000 | 50.000 |
| 178. | Ledo | Tujuh Belas | PP | 110.000 | 50.000 |
| 179. | Ledo | Seluas | PP | 150.000 | 50.000 |
| 180. | Ledo | Jagoi Babang | PP | 200.000 | 50.000 |
| 181. | Ledo | Siding | PP | 250.000 | 60.000 |
| 182. | Ledo | Bengkayang | PP | 130.000 | 50.000 |
| 183. | Ledo | Capkala | PP | 350.000 | 90.000 |
| 184. | Ledo | Sungai Raya | PP | 520.000 | 130.000 |

| No | Tempat Kedudukan | Tempat Tujuan | Satuan | Mobil | Sepeda Motor |
|------|------------------|-----------------------|--------|---------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 185. | Ledo | Sungai Raya Kepulauan | PP | 460.000 | 110.000 |
| 186. | Ledo | Monterado | PP | 290.000 | 70.000 |
| 187. | Ledo | Samalantan | PP | 260.000 | 70.000 |
| 188. | Ledo | Lembah Bawang | PP | 320.000 | 80.000 |
| 189. | Ledo | Sungai Betung | PP | 180.000 | 50.000 |
| 190. | Ledo | Teriak | PP | 170.000 | 50.000 |
| 191. | Ledo | Suti Semarang | PP | 290.000 | 70.000 |
| 192. | Ledo | Lumar | PP | 100.000 | 50.000 |
| 193. | Sanggau Ledo | Tujuh Belas | PP | 100.000 | 50.000 |
| 194. | Sanggau Ledo | Seluas | PP | 100.000 | 50.000 |
| 195. | Sanggau Ledo | Jagoi Babang | PP | 130.000 | 50.000 |
| 196. | Sanggau Ledo | Siding | PP | 180.000 | 50.000 |
| 197. | Sanggau Ledo | Bengkayang | PP | 190.000 | 50.000 |
| 198. | Sanggau Ledo | Capkala | PP | 410.000 | 100.000 |
| 199. | Sanggau Ledo | Sungai Raya | PP | 580.000 | 140.000 |
| 200. | Sanggau Ledo | Sungai Raya Kepulauan | PP | 520.000 | 130.000 |
| 201. | Sanggau Ledo | Monterado | PP | 350.000 | 90.000 |
| 202. | Sanggau Ledo | Samalantan | PP | 320.000 | 80.000 |
| 203. | Sanggau Ledo | Lembah Bawang | PP | 380.000 | 90.000 |
| 204. | Sanggau Ledo | Sungai Betung | PP | 240.000 | 60.000 |
| 205. | Sanggau Ledo | Teriak | PP | 220.000 | 60.000 |
| 206. | Sanggau Ledo | Suti Semarang | PP | 340.000 | 90.000 |
| 207. | Sanggau Ledo | Lumar | PP | 130.000 | 50.000 |
| 208. | Sanggau Ledo | Ledo | PP | 100.000 | 50.000 |
| 209. | Tujuh Belas | Seluas | PP | 110.000 | 50.000 |
| 210. | Tujuh Belas | Jagoi Babang | PP | 150.000 | 50.000 |
| 211. | Tujuh Belas | Siding | PP | 210.000 | 50.000 |
| 212. | Tujuh Belas | Bengkayang | PP | 210.000 | 60.000 |
| 213. | Tujuh Belas | Capkala | PP | 430.000 | 110.000 |
| 214. | Tujuh Belas | Sungai Raya | PP | 610.000 | 150.000 |
| 215. | Tujuh Belas | Sungai Raya Kepulauan | PP | 540.000 | 130.000 |
| 216. | Tujuh Belas | Monterado | PP | 380.000 | 90.000 |
| 217. | Tujuh Belas | Samalantan | PP | 350.000 | 90.000 |
| 218. | Tujuh Belas | Lembah Bawang | PP | 410.000 | 100.000 |
| 219. | Tujuh Belas | Sungai Betung | PP | 270.000 | 70.000 |
| 220. | Tujuh Belas | Teriak | PP | 260.000 | 70.000 |
| 221. | Tujuh Belas | Suti Semarang | PP | 370.000 | 90.000 |
| 222. | Tujuh Belas | Lumar | PP | 160.000 | 50.000 |
| 223. | Tujuh Belas | Ledo | PP | 110.000 | 50.000 |
| 224. | Tujuh Belas | Sanggau Ledo | PP | 100.000 | 50.000 |
| 225. | Seluas | Jagoi Babang | PP | 100.000 | 50.000 |
| 226. | Seluas | Siding | PP | 100.000 | 50.000 |
| 227. | Seluas | Bengkayang | PP | 260.000 | 70.000 |
| 228. | Seluas | Capkala | PP | 480.000 | 120.000 |
| 229. | Seluas | Sungai Raya | PP | 650.000 | 160.000 |
| 230. | Seluas | Sungai Raya Kepulauan | PP | 590.000 | 150.000 |
| 231. | Seluas | Monterado | PP | 430.000 | 110.000 |
| 232. | Seluas | Samalantan | PP | 400.000 | 100.000 |
| 233. | Seluas | Lembah Bawang | PP | 460.000 | 110.000 |
| 234. | Seluas | Sungai Betung | PP | 320.000 | 80.000 |
| 235. | Seluas | Teriak | PP | 310.000 | 80.000 |

| No | Tempat Kedudukan | Tempat Tujuan | Satuan | Mobil | Sepeda Motor |
|------|------------------|-----------------------|--------|---------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 236. | Seluas | Suti Semarang | PP | 430.000 | 110.000 |
| 237. | Seluas | Lumar | PP | 210.000 | 50.000 |
| 238. | Seluas | Ledo | PP | 150.000 | 50.000 |
| 239. | Seluas | Sanggau Ledo | PP | 100.000 | 50.000 |
| 240. | Seluas | Tujuh Belas | PP | 110.000 | 50.000 |
| 241. | Jagoi Babang | Siding | PP | 100.000 | 50.000 |
| 242. | Jagoi Babang | Bengkayang | PP | 310.000 | 80.000 |
| 243. | Jagoi Babang | Capkala | PP | 530.000 | 130.000 |
| 244. | Jagoi Babang | Sungai Raya | PP | 700.000 | 170.000 |
| 245. | Jagoi Babang | Sungai Raya Kepulauan | PP | 640.000 | 160.000 |
| 246. | Jagoi Babang | Monterado | PP | 470.000 | 120.000 |
| 247. | Jagoi Babang | Samalantan | PP | 440.000 | 110.000 |
| 248. | Jagoi Babang | Lembah Bawang | PP | 500.000 | 120.000 |
| 249. | Jagoi Babang | Sungai Betung | PP | 360.000 | 90.000 |
| 250. | Jagoi Babang | Teriak | PP | 350.000 | 90.000 |
| 251. | Jagoi Babang | Suti Semarang | PP | 470.000 | 120.000 |
| 252. | Jagoi Babang | Lumar | PP | 260.000 | 70.000 |
| 253. | Jagoi Babang | Ledo | PP | 200.000 | 50.000 |
| 254. | Jagoi Babang | Sanggau Ledo | PP | 130.000 | 50.000 |
| 255. | Jagoi Babang | Tujuh Belas | PP | 150.000 | 50.000 |
| 256. | Jagoi Babang | Seluas | PP | 100.000 | 50.000 |

D. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DARI KABUPATEN KE DESA WILAYAH SULIT DAN SANGAT SULIT

| No | Tempat Kedudukan | Desa/ Tempat Tujuan | Satuan | Besaran |
|-----|------------------|------------------------|--------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Bengkayang | Sungkung I | PP | 1.200.000 |
| 2. | Bengkayang | Sungkung II | PP | 1.000.000 |
| 3. | Bengkayang | Sungkung III | PP | 1.200.000 |
| 4. | Bengkayang | Tawang | PP | 1.200.000 |
| 5. | Bengkayang | Tamong | PP | 800.000 |
| 6. | Bengkayang | Kendaek | PP | 450.000 |
| 7. | Bengkayang | Dayung | PP | 170.000 |
| 8. | Bengkayang | Lomba Karya | PP | 170.000 |
| 9. | Bengkayang | Sidai | PP | 170.000 |
| 10. | Bengkayang | Seles | PP | 170.000 |
| 11. | Bengkayang | Suka Damai | PP | 170.000 |
| 12. | Bengkayang | Suka Jaya | PP | 170.000 |
| 13. | Bengkayang | Bengkawan | PP | 340.000 |
| 14. | Bengkayang | Kalon | PP | 340.000 |
| 15. | Bengkayang | Danti | PP | 250.000 |
| 16. | Bengkayang | Kumba | PP | 410.000 |
| 17. | Bengkayang | Semunying Jaya | PP | 410.000 |
| 18. | Bengkayang | Sinar Baru | PP | 410.000 |
| 19. | Bengkayang | Goa Boma | PP | 170.000 |
| 20. | Bengkayang | Rantau | PP | 170.000 |
| 21. | Bengkayang | Sumber Karya | PP | 130.000 |
| 22. | Bengkayang | Ampar Benteng | PP | 130.000 |

| No | Tempat Kedudukan | Desa/ Tempat Tujuan | Satuan | Besaran |
|-----|------------------|------------------------|--------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 23. | Bengkayang | Tanjung | PP | 130.000 |
| 24. | Bengkayang | Telidik | PP | 130.000 |
| 25. | Bengkayang | Temia Sio | PP | 130.000 |
| 26. | Bengkayang | Muhi Bersatu | PP | 400.000 |
| 27. | Bengkayang | Suka Maju | PP | 400.000 |
| 28. | Bengkayang | Cempaka Putih | PP | 400.000 |
| 29. | Bengkayang | Kiung | PP | 400.000 |
| 30. | Bengkayang | Kelayu | PP | 400.000 |
| 31. | Bengkayang | Suti Semarang | PP | 400.000 |
| 32. | Bengkayang | Tapen | PP | 400.000 |
| 33. | Bengkayang | Aris | PP | 290.000 |
| 34. | Bengkayang | Tangguh | PP | 470.000 |
| 35. | Bengkayang | Seren Serimbau | PP | 150.000 |
| 36. | Bengkayang | Kinande | PP | 260.000 |

E. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DI LUAR WILAYAH KABUPATEN DALAM PULAU KALIMANTAN

| No. | Tempat Tujuan | Satuan | Mobil | Sepeda Motor |
|--------|--------------------------|--------|-----------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | <i>Kalimantan Barat</i> | | | |
| 1.1 | Pontianak | PP | 540.000 | 130.000 |
| 1.1.1 | Kab. Kapuas Hulu | PP | 1.906.000 | 460.000 |
| 1.1.2 | Kab. Kayong Utara | PP | 1.454.000 | 350.000 |
| 1.1.3 | Kab. Ketapang | PP | 1.855.000 | 450.000 |
| 1.1.4 | Kab. Kubu Raya | PP | 540.000 | 130.000 |
| 1.1.5 | Kab. Landak | PP | 356.000 | 90.000 |
| 1.1.6 | Kab. Melawi | PP | 1.205.000 | 290.000 |
| 1.1.7 | Kab. Mempawah | PP | 420.000 | 110.000 |
| 1.1.8 | Kab. Sambas | PP | 298.000 | 80.000 |
| 1.1.9 | Kab. Sanggau | PP | 640.000 | 160.000 |
| 1.1.10 | Kab. Sekadau | PP | 821.000 | 200.000 |
| 1.1.11 | Kab. Sintang | PP | 1.057.000 | 260.000 |
| 1.1.12 | Kota. Singkawang | PP | 256.000 | 70.000 |
| 2 | <i>Kalimantan Tengah</i> | | | |
| 2.1 | Palangkaraya | PP | 3.586.000 | 860.000 |
| 2.1.1 | Kab. Barito Selatan | PP | 4.219.000 | 1.010.000 |
| 2.1.2 | Kab. Barito Timur | PP | 4.503.000 | 1.080.000 |
| 2.1.3 | Kab. Barito Utara | PP | 4.710.000 | 1.130.000 |
| 2.1.4 | Kab. Gunung Mas | PP | 4.103.000 | 980.000 |
| 2.1.5 | Kab. Kapuas | PP | 4.038.000 | 970.000 |
| 2.1.6 | Kab. Katingan | PP | 3.331.000 | 800.000 |
| 2.1.7 | Kab. Kotawaringin Barat | PP | 2.342.000 | 560.000 |
| 2.1.8 | Kab. Kotawaringin Timur | PP | 2.565.000 | 620.000 |
| 2.1.9 | Kab. Lamandau | PP | 2.239.000 | 540.000 |
| 2.1.10 | Kab. Murung Raya | PP | 4.616.000 | 1.110.000 |
| 2.1.11 | Kab. Pulau Pisau | PP | 3.870.000 | 930.000 |
| 2.1.12 | Kab. Seruyan | PP | 3.040.000 | 730.000 |
| 2.1.13 | Kab. Sukamara | PP | 2.278.000 | 550.000 |

| No. | Tempat Tujuan | Satuan | Mobil | Sepeda Motor |
|--------|---------------------------|--------|-----------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 3 | <i>Kalimantan Selatan</i> | | | |
| 3.1 | Banjarmasin | PP | 4.319.000 | 1.030.000 |
| 3.1.1 | Kab. Balangan | PP | 4.984.000 | 1.190.000 |
| 3.1.2 | Kab. Banjar | PP | 4.296.000 | 1.030.000 |
| 3.1.3 | Kab. Barito Kuala | PP | 4.300.000 | 1.030.000 |
| 3.1.4 | Kab. Hulu Sungai Selatan | PP | 4.510.000 | 1.080.000 |
| 3.1.5 | Kab. Hulu Sungai Tengah | PP | 4.600.000 | 1.100.000 |
| 3.1.6 | Kab. Hulu Sungai Utara | PP | 4.655.000 | 1.110.000 |
| 3.1.7 | Kab. Kota Baru | PP | 5.265.000 | 1.260.000 |
| 3.1.8 | Kab. Tabalong | PP | 4.619.000 | 1.110.000 |
| 3.1.9 | Kab. Tanah Bumbu | PP | 5.091.000 | 1.220.000 |
| 3.1.10 | Kab. Tanah Laut | PP | 4.477.000 | 1.070.000 |
| 3.1.11 | Kab. Tapin | PP | 4.474.000 | 1.070.000 |
| 3.1.12 | Kab. Sukamara | PP | 2.278.000 | 550.000 |
| 4 | <i>Kalimantan Timur</i> | | | |
| 4.1 | Samarinda | PP | 5.808.000 | 1.390.000 |
| 4.1.1 | Kab. Kutai Barat | PP | 5.324.000 | 1.270.000 |
| 4.1.2 | Kab. Kutai Kartanegara | PP | 5.895.000 | 1.410.000 |
| 4.1.3 | Kab. Kutai Timur | PP | 6.364.000 | 1.520.000 |
| 4.1.4 | Kab. Paser | PP | 5.149.000 | 1.230.000 |
| 4.1.5 | Kab. Penajam Paser Utara | PP | 5.414.000 | 1.300.000 |
| 5 | <i>Kalimantan Utara</i> | | | |
| 5.1 | Tanjung Selor | PP | 7.811.000 | 1.870.000 |
| 5.1.1 | Kab. Bulungan | PP | 7.798.000 | 1.860.000 |
| 5.1.2 | Kab. Malinau | PP | 8.415.000 | 2.010.000 |
| 5.1.3 | Kab. Nunukan | PP | 9.090.000 | 2.170.000 |
| 5.1.4 | Kab. Tana Tidung | PP | 8.266.000 | 1.980.000 |
| 5.1.5 | Kota Tarakan | PP | 8.573.000 | 2.050.000 |

F. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DI LUAR WILAYAH KABUPATEN

| No. | Provinsi | Satuan | Di Tempat Kedudukan | Di Tempat Tujuan |
|-----|------------------|--------|---------------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Aceh | PP | 540.000 | 246.000 |
| 2. | Sumatera Utara | PP | 540.000 | 464.000 |
| 3. | Riau | PP | 540.000 | 188.000 |
| 4. | Kepulauan Riau | PP | 540.000 | 274.000 |
| 5. | Jambi | PP | 540.000 | 294.000 |
| 6. | Sumatera Barat | PP | 540.000 | 380.000 |
| 7. | Sumatera Selatan | PP | 540.000 | 256.000 |
| 8. | Lampung | PP | 540.000 | 334.000 |
| 9. | Bengkulu | PP | 540.000 | 218.000 |
| 10. | Bangka Belitung | PP | 540.000 | 180.000 |
| 11. | Banten | PP | 540.000 | 892.000 |
| 12. | Jawa Barat | PP | 540.000 | 332.000 |
| 13. | D.K.I. Jakarta | PP | 540.000 | 512.000 |
| 14. | Jawa Tengah | PP | 540.000 | 150.000 |
| 15. | D.I. Yogyakarta | PP | 540.000 | 236.000 |

| No. | Provinsi | Satuan | Di Tempat Kedudukan | Di Tempat Tujuan |
|-----|--------------------------|--------|------------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 16. | Jawa Timur | PP | 540.000 | 388.000 |
| 17. | Bali | PP | 540.000 | 318.000 |
| 18. | Nusa Tenggara Barat | PP | 540.000 | 462.000 |
| 19. | Nusa Tenggara Timur | PP | 540.000 | 216.000 |
| 20. | Kalimantan Barat | PP | 540.000 | 270.000 |
| 21. | Kalimantan Tengah | PP | 540.000 | 222.000 |
| 22. | kalimantan Selatan | PP | 540.000 | 300.000 |
| 23. | Kalimantan Timur | PP | 540.000 | 900.000 |
| 24. | Kalimantan Utara | PP | 540.000 | 204.000 |
| 25. | Sulawesi Utara | PP | 540.000 | 276.000 |
| 26. | Gorontalo | PP | 540.000 | 480.000 |
| 27. | Sulawesi Barat | PP | 540.000 | 626.000 |
| 28. | Sulawesi Selatan | PP | 540.000 | 290.000 |
| 29. | Sulawesi Tengah | PP | 540.000 | 330.000 |
| 30. | Sulawesi Tenggara | PP | 540.000 | 342.000 |
| 31. | Maluku | PP | 540.000 | 480.000 |
| 32. | Maluku Utara | PP | 540.000 | 430.000 |
| 33. | Papua | PP | 540.000 | 862.000 |
| 34. | Papua Barat | PP | 540.000 | 364.000 |
| 35. | Kabupaten Kapuas Hulu *) | PP | 540.000 | 270.000 |
| 36. | Kabupaten Sintang *) | PP | 540.000 | 270.000 |
| 37. | Kabupaten Ketapang *) | PP | 540.000 | 270.000 |
| 38. | Kabupaten Melawi *) | PP | 540.000 | 270.000 |

*) satuan biaya taksi dalam kota dapat digunakan dalam hal perjalanan dinas dari tempat kedudukan menggunakan transportasi udara

G. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI UDARA/TIKET PESAWAT (PP) DARI BANDARA SUPADIO PONTIANAK

| No. | Kota/Provinsi Tujuan | Kelas | |
|-----|--|-----------|-----------|
| | | Bisnis | Ekonomi |
| (1) | (3) | (4) | (4) |
| 1. | Banda Aceh/Nanggroe Aceh Darussalam | 9.990.000 | 5.840.000 |
| 2. | Medan/Sumatera Utara | 9.733.000 | 5.230.000 |
| 3. | Padang/Sumatera Barat | 8.193.000 | 4.460.000 |
| 4. | Batam/Kepulauan Riau | 7.594.000 | 4.396.000 |
| 5. | Pekanbaru/Riau | 8.247.000 | 4.514.000 |
| 6. | Jambi/Jambi | 6.878.000 | 4.011.000 |
| 7. | Palembang/Sumatera Selatan | 6.685.000 | 3.840.000 |
| 8. | Bengkulu/Bengkulu | 6.685.000 | 3.840.000 |
| 9. | Bandar Lampung/Lampung | 5.380.000 | 3.220.000 |
| 10. | Pangkal Pinang/Kepulauan Bangka Belitung | 6.279.000 | 3.733.000 |
| 11. | Tanjung Pinang/Kepulauan Riau | 8.247.000 | 4.514.000 |
| 12. | Jakarta/D.K.I. Jakarta | 4.353.000 | 2.781.000 |
| 13. | Bandung/Jawa Barat | 4.353.000 | 2.781.000 |
| 14. | Semarang/Jawa Tengah | 6.685.000 | 3.765.000 |
| 15. | Yogyakarta/D.I. Yogyakarta | 6.910.000 | 3.840.000 |
| 16. | Solo/Jawa Tengah | 6.685.000 | 3.904.000 |
| 17. | Surabaya/Jawa Timur | 8.140.000 | 4.204.000 |
| 18. | Denpasar/Bali | 7.990.000 | 4.738.000 |

| No. | Kota/Provinsi Tujuan | Kelas | |
|-----|--|------------|-----------|
| | | Bisnis | Ekonomi |
| (1) | (3) | (4) | (4) |
| 19. | Mataram/Nusa Tenggara Barat | 8.001.000 | 4.706.000 |
| 20. | Kupang/Nusa Tenggara Timur | 8.001.000 | 4.706.000 |
| 21. | Palangkaraya/Kalimantan Tengah | 9.337.000 | 5.765.000 |
| 22. | Banjarmasin/Kalimantan Selatan | 9.605.000 | 5.776.000 |
| 23. | Samarinda/Kalimantan Timur | 11.765.000 | 6.578.000 |
| 24. | Tanjung Selor/Tarakan/Kalimantan Utara | 11.765.000 | 6.578.000 |
| 25. | Manado/Sulawesi Utara | 12.953.000 | 6.396.000 |
| 26. | Palu/Sulawesi Tengah | 12.953.000 | 6.396.000 |
| 27. | Makassar/Sulawesi Selatan | 9.915.000 | 5.241.000 |
| 28. | Kendari/Sulawesi Tenggara | 12.953.000 | 6.396.000 |
| 29. | Gorontalo/Gorontalo | 12.953.000 | 6.396.000 |
| 30. | Mamuju/Sulawesi Barat | 9.915.000 | 5.241.000 |
| 31. | Ambon/Maluku | 12.953.000 | 6.396.000 |
| 32. | Sofifi/Maluku Utara | 12.953.000 | 6.396.000 |
| 33. | Jayapura/Papua | 16.322.000 | 9.177.000 |
| 34. | Manokwari/Papua Barat | 16.322.000 | 9.177.000 |
| 35. | Ketapang/Ketapang | - | 1.500.000 |
| 36. | Sintang/Sintang | - | 1.500.000 |
| 37. | Nanga Pinoh/Melawi | - | 1.500.000 |
| 38. | Putussibau/Kapuas Hulu | - | 2.000.000 |

H. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DI LUAR WILAYAH KABUPATEN

| No | Provinsi | Satuan | Tarif Hotel | | | |
|-----|---------------------|--------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| | | | Pejabat Negara/ Pimpinan DPRD | Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II | Pejabat Eselon III/ Golongan IV | Pejabat Eselon IV/ Golongan III/II/I/ Non ASN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Aceh | OH | 4.420.000 | 3.526.000 | 1.294.000 | 616.000 |
| 2. | Sumatera Utara | OH | 4.960.000 | 2.195.000 | 1.100.000 | 663.000 |
| 3. | Riau | OH | 3.820.000 | 3.119.000 | 1.650.000 | 852.000 |
| 4. | Kepulauan Riau | OH | 5.344.000 | 2.318.000 | 1.297.000 | 792.000 |
| 5. | Jambi | OH | 5.000.000 | 4.102.000 | 1.225.000 | 580.000 |
| 6. | Sumatera Barat | OH | 5.236.000 | 3.332.000 | 1.353.000 | 701.000 |
| 7. | Sumatera Selatan | OH | 5.850.000 | 3.083.000 | 1.571.000 | 861.000 |
| 8. | Lampung | OH | 4.491.000 | 2.448.000 | 1.140.000 | 580.000 |
| 9. | Bengkulu | OH | 2.140.000 | 1.628.000 | 1.546.000 | 692.000 |
| 10. | Bangka Belitung | OH | 3.827.000 | 2.838.000 | 1.957.000 | 622.000 |
| 11. | Banten | OH | 5.725.000 | 2.373.000 | 1.080.000 | 718.000 |
| 12. | Jawa Barat | OH | 5.381.000 | 2.755.000 | 1.201.000 | 686.000 |
| 13. | D.K.I. Jakarta | OH | 8.720.000 | 2.063.000 | 992.000 | 730.000 |
| 14. | Jawa Tengah | OH | 4.242.000 | 1.850.000 | 1.024.000 | 600.000 |
| 15. | D.I. Yogyakarta | OH | 5.017.000 | 2.695.000 | 1.384.000 | 845.000 |
| 16. | Jawa Timur | OH | 4.449.000 | 2.007.000 | 1.076.000 | 814.000 |
| 17. | Bali | OH | 5.478.000 | 1.946.000 | 1.348.000 | 1.138.000 |
| 18. | Nusa Tenggara Barat | OH | 3.500.000 | 2.648.000 | 1.418.000 | 907.000 |
| 19. | Nusa Tenggara Timur | OH | 4.491.000 | 2.133.000 | 1.355.000 | 688.000 |
| 20. | Kalimantan Barat | OH | 2.654.000 | 1.923.000 | 1.125.000 | 538.000 |
| 21. | Kalimantan Tengah | OH | 4.901.000 | 3.391.000 | 1.160.000 | 659.000 |

| No | Provinsi | Satuan | Tarif Hotel | | | |
|-----|--------------------|--------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| | | | Pejabat Negara/ Pimpinan DPRD | Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II | Pejabat Eselon III/ Golongan IV | Pejabat Eselon IV/ Golongan III/II/I/ Non ASN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 22. | Kalimantan Selatan | OH | 4.797.000 | 3.316.000 | 1.500.000 | 697.000 |
| 23. | Kalimantan Timur | OH | 4.000.000 | 2.188.000 | 1.507.000 | 804.000 |
| 24. | Kalimantan Utara | OH | 4.000.000 | 2.735.000 | 1.507.000 | 904.000 |
| 25. | Sulawesi Utara | OH | 4.919.000 | 2.290.000 | 1.170.000 | 978.000 |
| 26. | Gorontalo | OH | 4.168.000 | 3.107.000 | 1.605.000 | 955.000 |
| 27. | Sulawesi Barat | OH | 4.076.000 | 3.098.000 | 1.075.000 | 704.000 |
| 28. | Sulawesi Selatan | OH | 4.820.000 | 1.938.000 | 1.138.000 | 745.000 |
| 29. | Sulawesi Tengah | OH | 2.309.000 | 2.027.000 | 1.567.000 | 951.000 |
| 30. | Sulawesi Tenggara | OH | 2.475.000 | 2.574.000 | 1.297.000 | 786.000 |
| 31. | Maluku | OH | 3.467.000 | 3.240.000 | 1.048.000 | 667.000 |
| 32. | Maluku Utara | OH | 3.440.000 | 3.843.000 | 1.160.000 | 600.000 |
| 33. | Papua | OH | 3.859.000 | 3.318.000 | 2.521.000 | 1.038.000 |
| 34. | Papua Barat | OH | 3.872.000 | 3.341.000 | 2.056.000 | 967.000 |

I. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

| No | Uraian | Satuan | Luar Kota Di Luar Wilayah Kabupaten | Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam/ Luar Kota Dalam Wilayah Kabupaten |
|-----|------------------------------------|--------|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD | OH | 250.000 | 125.000 |
| 2. | Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD | OH | 150.000 | 75.000 |

J. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

| No. | Provinsi | Satuan | Mobil (Roda 4) | Bus Besar (Roda 6) | Bus Besar (lebih Roda 6) |
|-----|---------------------|----------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Aceh | Per Hari | 930.000 | 3.282.000 | 4.638.000 |
| 2. | Sumatera Utara | Per Hari | 1.220.000 | 2.890.000 | 3.475.000 |
| 3. | Riau | Per Hari | 978.000 | 3.155.000 | 4.585.000 |
| 4. | Kepulauan Riau | Per Hari | 979.000 | 2.373.000 | 3.910.000 |
| 5. | Jambi | Per Hari | 1.005.000 | 5.585.000 | 7.190.000 |
| 6. | Sumatera Barat | Per Hari | 922.000 | 2.124.000 | 3.500.000 |
| 7. | Sumatera Selatan | Per Hari | 1.507.000 | 2.200.000 | 4.097.000 |
| 8. | Lampung | Per Hari | 846.000 | 3.594.000 | 5.052.000 |
| 9. | Bengkulu | Per Hari | 985.000 | 4.763.000 | 6.449.000 |
| 10. | Bangka Belitung | Per Hari | 1.258.000 | 3.477.000 | 5.342.000 |
| 11. | Banten | Per Hari | 972.000 | 2.801.000 | 4.120.000 |
| 12. | Jawa Barat | Per Hari | 932.000 | 2.563.000 | 3.519.000 |
| 13. | D.K.I. Jakarta | Per Hari | 1.139.000 | 2.459.000 | 3.439.000 |
| 14. | Jawa Tengah | Per Hari | 1.270.000 | 2.675.000 | 4.237.000 |
| 15. | D.I. Yogyakarta | Per Hari | 905.000 | 2.247.000 | 3.565.000 |
| 16. | Jawa Timur | Per Hari | 1.171.000 | 2.446.000 | 3.303.000 |
| 17. | Bali | Per Hari | 1.157.000 | 3.174.000 | 3.911.000 |
| 18. | Nusa Tenggara Barat | Per Hari | 1.103.000 | 2.532.000 | 3.369.000 |
| 19. | Nusa Tenggara Timur | Per Hari | 857.000 | 3.059.000 | 3.468.000 |

| No. | Provinsi | Satuan | Mobil (Roda 4) | Bus Besar (Roda 6) | Bus Besar (lebih Roda 6) |
|-----|--------------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 20. | Kalimantan Barat | Per Hari | 868.000 | 3.471.000 | 4.573.000 |
| 21. | Kalimantan Tengah | Per Hari | 1.177.000 | 4.645.000 | 6.706.000 |
| 22. | kalimantan Selatan | Per Hari | 837.000 | 2.630.000 | 3.550.000 |
| 23. | Kalimantan Timur | Per Hari | 1.100.000 | 3.112.000 | 4.829.000 |
| 24. | Kalimantan Utara | Per Hari | 1.100.000 | 2.713.000 | 4.829.000 |
| 25. | Sulawesi Utara | Per Hari | 1.195.000 | 2.498.000 | 3.845.000 |
| 26. | Gorontalo | Per Hari | 792.000 | 2.504.000 | 4.038.000 |
| 27. | Sulawesi Barat | Per Hari | 880.000 | 3.080.000 | 3.282.000 |
| 28. | Sulawesi Selatan | Per Hari | 938.000 | 3.385.000 | 4.293.000 |
| 29. | Sulawesi Tengah | Per Hari | 824.000 | 2.423.000 | 4.212.000 |
| 30. | Sulawesi Tenggara | Per Hari | 945.000 | 2.609.000 | 5.150.000 |
| 31. | Maluku | Per Hari | 1.149.000 | 3.590.000 | 4.021.000 |
| 32. | Maluku Utara | Per Hari | 1.061.000 | 3.013.000 | 4.170.000 |
| 33. | Papua | Per Hari | 1.114.000 | 4.082.000 | 5.248.000 |
| 34. | Papua Barat | Per Hari | 1.171.000 | 3.499.000 | 4.547.000 |

K. SATUAN BIAYA PEMETIAN DAN PEMULANGAN JENAZAH

| No | Uraian | Pejabat Negara/ Pimpinan DPRD | Pejabat Eselon II/ Anggota DPRD | Pejabat Eselon III/ Eselon IV | ASN Non Eselon/ Non ASN |
|-----|------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Biaya Pemetian | 7.500.000 | 6.500.000 | 5.500.000 | 4.500.000 |
| 2. | Biaya Pemulangan | Menurut tarif yang berlaku dan alat angkutan yang digunakan (<i>at cost</i>) | | | |

L. SATUAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN BIAYA BAGASI

| No | Uraian | Satuan | Tarif |
|-------------------------------------|---|-----------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| <i>Biaya Pemeriksaan Kesehatan:</i> | | | |
| 1. | Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) | Kali | 300.000 |
| 2. | Rapid Test Antibodi | Kali | 150.000 |
| 3. | Rapid Test Antigen | Kali | 275.000 |
| 4. | Lainnya | Kali | Sesuai tarif yang berlaku (dibayarkan secara riil) |
| <i>Biaya Bagasi:</i> | | | |
| 1. | Maksimal 10 Kg untuk kelebihan bagasi/bagasi berbayar dan membawa dokumen | per Tiket | 350.000 |
| 2. | Maksimal 15 Kg untuk membawa komputer server | | |

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS